Model Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya: Pendekatan Dimensi Sosial, Ekonomi, dan Budaya.

Ella Nurlela[a], Diana[a]
[a] Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

Keywords:
Kemiskinan, Pedesaan, Pendekatan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Corresponding Author:
Ella Nurlela, Diana
Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung
Email:
ella.nurlela165@gmail.com
diana.sunalii@gmail.com

Abstract: *Although the amount and percentage of poor people in Indonesia tends to decline in recent years, yet the inequality between urban and rural areas remains high. On the other hand, current studies on poverty have evolved in understanding the issue of poverty. The studies are not only focusing on economic dimension, but also multidimensional, including social and cultural dimensions. In this regard, this study will discuss the problem of poverty in rural areas in Indonesia. This study argues that poverty reduction efforts for rural areas in Indonesia should be based on a multidimensional and contextual approach, namely social, economic, and cultural. That is, it takes a deepening of both barrier and supporting factors of poverty based on social, economic, and cultural aspects. In Indonesia, one of the areas with a high inequality level is Tasikmalaya. Thus, this study uses a qualitative approach with a case study in Tasikmalaya District. Based on the results, this study recommends a poverty reduction effort named "Multidimensional Poverty Reduction Program Design: Increasing Entrepreneurial Spirit" which is carried out on three different targets, namely the unproductive age using the social investment approach, the productive age using the economic investment approach, and the nonproductive age using the social service approach.*

Abstrak: *Meskipun jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir, tetapi disparitas kemiskinan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih tetap tinggi. Penelitian-penelitian mutakhir tentang kemiskinan pun telah berkembang dalam memahami persoalan kemiskinan. Penelitian-penelitian tersebut tidak lagi berfokus pada dimensi ekonomi saja, tetapi multidimensi, termasuk dimensi sosial dan budaya. Berkaitan dengan itu, penelitian ini akan membahas tentang persoalan kemiskinan di wilayah pedesaan di Indonesia. Penelitian ini berargumen upaya pengentasan kemiskinan bagi pedesaan di Indonesia patut berbasiskan pendekatan yang multidimensi dan kontekstual, yaitu sosial, ekonomi, dan budaya. Artinya, butuh pendalaman faktor-faktor penghambat dan pendukung kemiskinan yang berbasiskan aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Di Indonesia, salah satu wilayah dengan disparitas kemiskinan kota dan desa yang tinggi adalah Tasikmalaya. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di Kabupaten Tasikmalaya. Hasil penelitian merekomendasikan suatu program penanggulangan kemiskinan berupa "Rancangan Program Penanggulangan Kemiskinan Multidimensi: Peningkatan Jiwa Kewirausahaan" yang dilakukan kepada tiga sasaran berbeda, yaitu usia belum produktif dengan pendekatan investasi sosial, usia produktif dengan pendekatan investasi ekonomi, dan usia nonproduktif dengan pendekatan layanan sosial.*

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan konsep yang multidimensional. Kemiskinan berdasarkan dimensi ekonomi merupakan kurangnya sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. BPS mengukur kemiskinan dengan pendekatan kebutuhan dasar (ekonomi). Berdasarkan dimensi sosial politik, kemiskinan merupakan kurangnya derajat akses terhadap pemenuhan sumber daya (termasuk melihat kemiskinan dengan pendekatan struktural). Sedangkan kemiskinan berdasarkan dimensi sosial merupakan kurangnya jaringan sosial dan struktur yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan untuk produktif (terlembaganya nilai-nilai apatis, apolitis, fatalistik, ketidakberdayaan,dsb.).

Gambar 1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia (1999-2019)

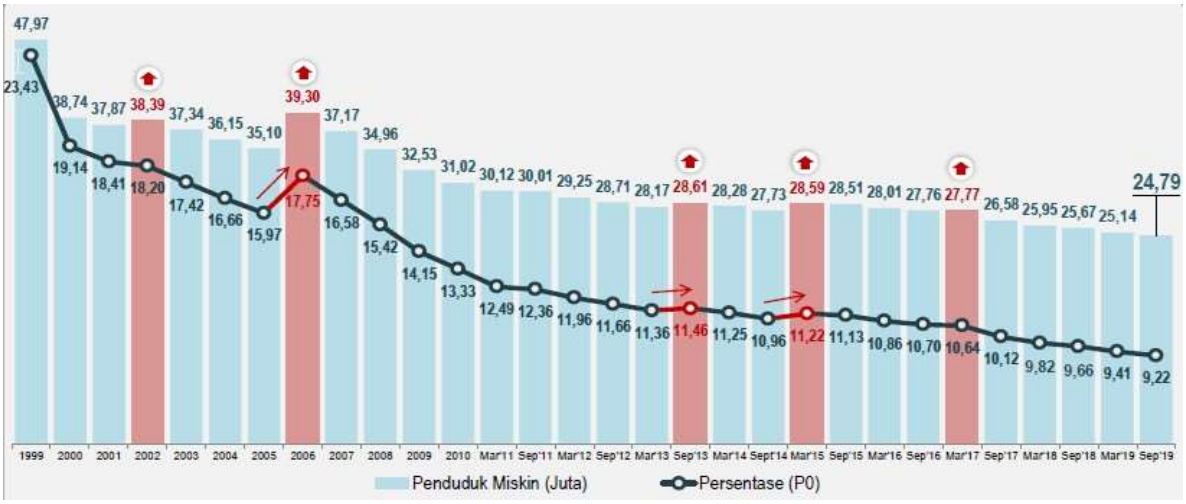

Sumber: BPS (2020)

Gambar 2 Garis Kemiskinan di Indonesia (1999-2019)

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan)			Sumbangan Garis Kemiskinan (%)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total	Makanan	Bukan Makanan	Total
September 2018	302 022	108 648	410 670	73,54	26,46	100,00
Maret 2019	313 232	112 018	425 250	73,66	26,34	100,00
September 2019	324 911	115 627	440 538	73,75	26,25	100,00
Perubahan Sep'18-Sep'19 (%)	7,58	6,42	7,27	-	-	-
Perubahan Mar'19-Sep'19(%)	3,73	3,22	3,60	-	-	-

Sumber: BPS (2020)

Penduduk miskin merupakan jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (BPS, 2020). Presentase dan jumlah penduduk miskin Indonesia cenderung menurun sejak 2006. Presentase penduduk miskin Indonesia pada September 2019 sebesar 9.22%, menurun 0.19% dari Maret 2019. Jumlah penduduk miskin

Indonesia pada September 2019 sebesar 24.79 juta orang, menurun 0.36 juta orang dari Maret 2019 (BPS, 2020). Selama Maret 2019 sampai September 2019, garis kemiskinan meningkat sebesar 3.60%, yaitu dari Rp425 450 per kapita per bulan menjadi Rp440 538 per kapita per bulan (BPS, 2020). Sayangnya, disparitas persentase penduduk miskin di kota dan desa masih tinggi. Presentase penduduk miskin pada September 2019 di kota adalah 6.56%, sedangkan di desa 12.60% (BPS, 2020).

Gambar 3 Disparitas Kemiskinan Kota dan Desa di Indonesia (2018-2019)



Sumber: BPS (2020)

Tasikmalaya merupakan salah satu wilayah dengan disparitas tinggi. Kota Tasikmalaya memiliki presentase penduduk miskin tertinggi di Jawa Barat sebesar 11.60% (BPS, 2020). Pendapatan perkapita Rp368 000 atau berbekal sekitar Rp10 000 untuk bertahan hidup per harinya. Hal tersebut disebabkan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di wilayah Tasikmalaya yang secara umum belum optimal. Kebijakan penanggulangan belum berjalan secara terintegrasi (ada isu ego kelembagaan). TKPD tidak maksimal dalam isu pengembangan kemitraan dan penanganan pengaduan. Belum berjalannya kolaborasi atau pelibatan swasta, akademisi, dan masyarakat umum. Dorongan dan sinergitas guna peningkatan kapasitas UMKM tidak maksimal.

Gambar 4 Jumlah Penduduk Miskin Jawa Barat Berdasarkan Wilayah (2019)

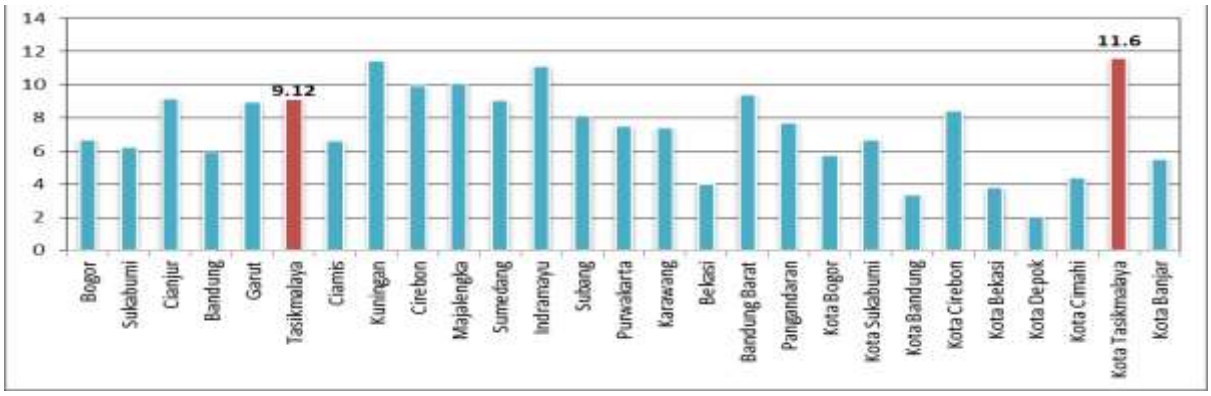

Sumber: BPS (2020)

Berdasarkan adanya kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat yang menyebabkan terjadinya kemiskinan pada Kabupaten Tasikmalaya serta menyusun model pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya melalui pendekatan dimensi sosial, ekonomi, dan budaya. Penentuan model pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya dilakukan dengan melalui pendenkatan dimensi sosial, ekonomi, dan budaya.

METODE

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bulan Februari sampai Desember 2020 dengan mengambil lokasi Kabupaten Tasikmalaya.

B. Metode Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui teknik naturalistic-interpretatif dengan wawancara mendalam (*in-depth interview*) atau *forum grup discussion* kepada informan, dan observasi langsung. Informan yang digunakan dalam penelitian diseleksi berdasarkan metode *purposive sampling*. Informan utamanya dicirikan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan mekanisme pemberdayaan dalam kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya. Adapun data sekunder pendukung lainnya diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), jurnal internasional, serta penelitian terdahulu melalui penelusuran dokumen dan kajian.

C. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, khususnya menggunakan mekanisme pengolahan tematik. Ada lima tahap yang harus dilakukan dalam mekanisme tersebut (Creswell, 2003), seperti: (1) Mempersiapkan data dengan cara membuat catatan wawancara mendalam dan FGD serta memilah catatan observasi; (2) Membaca keseluruhan data secara teliti untuk merefleksikan maknanya sesuai konteks penelitian; (3) Melakukan labeling dan coding pada data. Artinya mengolah data menjadi kategori dan subkategori; (4) Mendeskripsikan data dan mengorganisasikan data berdasarkan hubungan-hubungan logis yang terlihat; (5) Melakukan proses analisis seperti peninjauan data, mengeksplorasi data berdasarkan konsep-konsep penelitian, menyesuaikannya dengan pertanyaan dan argument penelitian, hingga mendapatkan kesimpulan dan saran penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Persepsi Warga Terkait Kemiskinan Sub Pembahas

Dalam sudut pandang subjektif, kemiskinan digambarkan secara umum oleh warga sebagai tidak terpenuhinya kebutuhan, tidak bahagia, dan banyak beban. Sebaliknya, kesejahteraan

secara umum digambarkan warga sebagai terpenuhinya keinginan dan kebutuhan serta bahagia. Kesejahteraan dalam sudut pandang objektif terbagi menjadi tiga aspek, yaitu: aspek kesehatan dan gizi, aspek material, dan aspek lingkungan. Pada aspek kesehatan dan gizi, warga umumnya memilih makanan tergantung pendapatan, sebisa mungkin memenuhi gizi anak. Pada aspek material, warga umumnya merasa nyaman dengan tempat tinggalnya, memiliki kendaraan (minimal motor), dan memiliki sawah atau hewan ternak. Pada aspek lingkungan, fasilitas umum dianggap warga secara umum baik dan akses mudah, tapi beberapa warga mengeluh lahan sawah sudah dibangun oleh pemerintah atau pemukiman.

B. Kemiskinan Multidimensional

Terdapat beberapa hal yang dapat menjadi faktor penghambat dan pendukung untuk kondisi kemiskinan bagi warga Kabupaten Tasikmalaya. Faktor penghambat dan pendukung kondisi kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya dikelompokkan berdasarkan tiga dimensi, yaitu dimensi sosial, ekonomi, dan budaya. Pada dimensi sosial, warga umumnya senang dengan hubungan saling membantu yang dimiliki tetangga. Jika ada kesulitan, warga saling membantu. Peran komunitas seperti PKK dan orsos peduli kemiskinan pun cukup menonjol, paling tidak mereka membantu soal pertukaran informasi terkait bantuan dari pemerintah. Kendala utama adalah pengetahuan dan skill warga dalam meningkatkan pendapatan ekonomi yang dipengaruhi pendidikan/pelatihan kurang.

Pada dimensi ekonomi, warga merasa bantuan kesejahteraan, seperti program PKH atau pemberdayaan dari pemerintah cukup membantu. Namun, warga masih mengeluh soal konsistensi dan ketetapan program tersebut. Kendala utamanya adalah warga kerap tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk program-program pemberdayaan terkait.

Terakhir, pada dimensi budaya, warga merasa nilai tolong-menolong sangat lekat dalam ketetanggaannya. Oleh sebab itu, dalam hal ini peningkatan kesejahteraan sangat mungkin didorong dari aspek budaya karena apabila ada yang kesusahan, tetangga akan membantu. Sebagai contoh, jika ada yang meninggal, warga pun menyediakan makanan untuk keluarga yang ditinggalkan tersebut jika mereka mengadakan tahlilan. Namun, warga pun masih banyak yang menganggap keadaan kekurangan adalah “takdir”.

C. Gambaran Persoalan Kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya

Kabupaten Tasikmalaya memiliki lahan yang potensial untuk pertanian dan peternakan. Kabupaten Tasikmalaya juga memiliki akses fasilitas umum dan informasi yang baik, serta aspek dan nilai ketetanggaan yang kuat. Peran pemerintah dan komunitas seperti PKK dan orsos peduli kemiskinan juga cukup kuat. Dengan potensi tersebut, kemisikan masih terjadi di Kabupaten Tasikmalaya karena adanyan dorongan dari beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya, kesenjangan akses produktif (pengetahuan dan keterampilan ekonomi, eksklusi akses kredit, dll.), pendidikan yang belum merata secara kualitas/kesenjangan pendidikan, bantuan pemerintah

terkendala soal konsistensi dan ketetapan waktu, program-program pemberdayaan dan pembangunan daerah yang belum sepenuhnya partisipatif dan ada alih-lahan pembangunan, dan secara budaya, beberapa warga merasa "keadaan kekurangan adalah takdir" dan "harus diterima begitu saja".

D. Rekomendasi Program

Rancangan program penanggulangan kemiskinan yang cocok diterapkan pada Kabupaten Tasikmalaya adalah peningkatan jiwa kewirausahaan. Asumsi dari program tersebut adalah kemiskinan merupakan hal yang multidimensi, multisektor, dan beragam karakteristik sesuai sesuai kondisi/karakteristik wilayah. Paradigma program tersebut yaitu pemberdayaan masyarakat yang menempatkan masyarakat terkait sebagai pelaku utama pembangunan. Adapun prinsip dari program yaitu inklusif, partisipatif, demokratis, dan berwawasan.

Program peningkatan jiwa kewirausahaan di Kabupaten Tasikmalaya berfokus pada empat aspek, yaitu: pendidikan; kesehatan, gizi, dan kebutuhan dasar lainnya; lingkungan, pemukiman, aksesibilitas, dan prasarana pendukung lainnya; usaha dan lapangan kerja; peningkatan pendapatan dan daya beli. Sasaran program pada usia belum produktif (<15 tahun) berfokus pada investasi sosial seperti peningkatan pendidikan dan kesehatan/gizi. Pada usia produktif sasaran program berfokus pada investasi ekonomi seperti peningkatan aksesibilitas pada sektor rill. Sedangkan pada usia non produktif, sasaran program berfokus pada pelayanan sosial seperti peningkatan aksesibilitas pada program-program bantuan sosial.

Prasyarat pendukung terlaksananya program tersebut adalah membentuk Komiite Forum Lintas Pelaku Program Penanggulangan Kemiskinan yang terdiri dari perwakilan penduduk miskin sebagai pelaku utama, perwakilan penduduk miskin daerah lain (untuk pertukaran informasi), lembaga independen/lembaga swadaya masyarakat/organisasi sosial/komunitas, pihak pemerintah, pihak swasta, pihak perguruan tinggi, dan unsur pengawasan dan pengendalian. Alur sinergi program berawal dengan sumber dana dari pemerintah, lembaga swasta, dan lembaga donor, kemudian Komite Forum Lintas Pelaku Program Penanggulangan Kemiskinan yang akan menampung aspirasi penduduk lokal, membantu merumuskan hal-hal yang tidak dapat dirumuskan oleh penduduk lokal, menampung data-data daerah terkait (pusat data) untuk optimalisasi kegiatan program, serta evaluasi dan pengawasan kegiatan, kemudian implementasi kegiatan dilakukan oleh komunitas daerah terkait.

Contoh kegiatan program pada usia belum produktif adalah mendorong pendidikan dan layanan kesehatan/gizi yang inklusif, mendorong lingkungan dan fasilitas publik yang inklusif, dan bimbingan nilai-nilai kemandirian serta kewirausahaan sosial agar tidak ada nilai budaya "keadaan sulit adalah takdir" ketika dewasa. Pada usia produktif contok kegiatan program yang dapat dilakukan adalah bimbingan perencanaan keuangan, bimbingan akses produktif (kredit,

bank, dsb.), pengembangan kelompok usaha bersama, pengembangan lahan mandiri sesuai potensi daerah, bimbingan produksi ekonomi daerah, bimbingan dan pengelolaan sektor pemasaran usaha daerah, dan pelatihan keterampilan mandiri (kerajinan, jahit, bengkel, dll.). Pada usia non produktif contoh kegiatan program yang dapat dilakukan yaitu memastikan inklusi bantuan sosial dan mengadakan pelatihan-pelatihan serta hiburan-hiburan supaya lansia tidak stress.

KESIMPULAN

Kemiskinan merupakan konsep yang berdimensi ganda dan tidak hanya diartikan secara ekonomi, tetapi juga ada dimensi-dimensi untuk memahami konsep kemiskinan, seperti ekonomi, sosial-politik, dan sosial-budaya. Dalam konteks Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan ketiga dimensi tersebut, beberapa faktor penghambat kemiskinannya adalah akses fasilitas umum dan informasi cukup baik, masih memiliki lahan yang potensial, program pemerintah cukup membantu meski ada beberapa kendala, kuatnya aspek dan nilai ketetanggaan, serta peran komunitas cukup kuat, seperti PKK dan orsos peduli kemiskinan, minimal mereka memberi informasi soal bantuan pemerintah. Kemudian, aspek pendukung kemiskinannya adalah kesenjangan akses produktif, kesenjangan pendidikan, bantuan pemerintah terkendala soal konsistensi dan ketetapan waktu, program-program pemberdayaan dan pembangunan daerah yang belum sepenuhnya partisipatif dan ada alih- lahan pembangunan, serta beberapa warga merasa "keadaan kekurangan adalah takdir" dan "harus diterima begitu saja". Untuk mengatasi persoalan tersebut, dapat diimplementasikan "Rancangan Program Penanggulangan Kemiskinan Multidimensi: Peningkatan Jiwa Kewirausahaan" yang dilakukan kepada tiga sasaran berbeda yaitu usia belum produktif dengan pendekatan investasi sosial, usia produktif dengan pendekatan investasi ekonomi, dan usia nonproduktif dengan pendekatan layanan sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Ketua Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung yang telah memberikan kesempatan kepada tim peneliti untuk melaksanakan kegiatan penelitian unit kajian
2. Kepala Pusat Penelitian Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung yang telah memberikan fasilitas dan dukungan penuh secara materiel maupun moral, sehingga terselenggaranya kegiatan penelitian unit kajian
3. Ketua dan anggota Unit Kajian dan Layanan Pembangunan Sosial, Ekonomi, dan Budaya yang telah mendukung tim peneliti untuk melaksanakan kegiatan penelitian unit kajian
4. Pembahas dan rekan-rekan dosen lain yang telah memberikan masukan ketika seminar laporan penelitian demi perbaikan laporan ini

5. Seluruh pihak terkait lainnya yang turut membantu terselenggaranya kegiatan penelitian unit kajian

DAFTAR PUSTAKA

Allard, S. (2017). *Places in Need*. New York: Russell Sage.

Allman, D. (2013). The Sociology of Social Inclusion. *SAGE Open January-March 2013*, 1-16.

BI. (2015). *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dan Bank Indonesia.

Boone, K., Roets, G., & Roose, R. (2018). Social Work, Participation, and Poverty. *Journal of Social Work, Vol. 0*, No. 0, 1-18.

BPS. (2020). *Berita Resmi Statistik Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

BPS Jabar. (2019). *Berita Resmi Statistik Jawa Barat*. Bandung: Badan Pusat Statistik Jawa Barat.

BPS Kab. Tasik. (2020). *Berita Resmi Statistik Kabupaten Tasikmalaya*. Kabupaten Tasikmalaya: Badan Pusat Statistik

Brady, D. (2009). *Rich Democracies, Poor People*. Oxford: Oxford University Press.

Brady, D. (2019). Theories of the Causes of Poverty. *Annual Review of Sociology*, Vol. 45, 155-175.

Brady, D., Baker, R. S., & Finnigan, R. (2016). How Politics and Institutions Shape Poverty and Inequality. In D. Brady, & L. M. Burton, *The Oxford Handbook of the Social Science of Poverty* (pp. 117-140). Oxford: Oxford University Press.

Coleman, J. S. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. *Vol. 94, Supplement: Organizations and Institutions: Sociological and Economic Approaches to Analysis of Social Structure*, 95-120.

Fodor, E., & Horn, D. (2015). "Economic Development" and Gender Equality: Explaining Variations in the Gender Poverty Gap after Socialism. *Social Problems, Vol. 62, No. 2*, 286-308.

Ghosh, A. K. (2005). Sociology of Poverty: Some Conceptual Issues. *Social Change, Vol. 35, No. 4*, 135-140.

Huber, E., & Stephens, J. D. (2012). *Democracy and the Left*. Chicago: Chicago University Press.

Jo, Y. N. (2012). Psycho-social Dimensions of Poverty: When Poverty Becomes Shameful. *Critical Social Policy, Vol. 33, No. 3*, 514-531.

Jordan, B. (2008). Social Work and World Poverty. *International Social Work, Vol. 51, No. 4*, 440-452.

Kemendagri. (2018, September 04). *Kelemahan Pengentasan Kemiskinan di Tasikmalaya*. Retrieved Mei 28, 2020, from Badan Litbang Kemendagri: https://litbang.kemendagri.go.id/website/kelemahan-pengentasan-kemiskinan-di-tasikmalaya/

Kemensos. (2019). *Laporan Kinerja Kementerian Sosial RI Tahun 2018*. Jakarta: Kementeri an Sosial Republik Indonesia.

Massey, D. (2016). Segregation and the Perpetuation of Disadvantage. In D. Brady, & L. M. Burton, *The Oxford Handbook of the Social Science of Poverty* (pp. 370-393). Oxford: Oxford University Press.

Misra et al. (2012). Family Policies, Employment and Poverty among Partnered and Single Mothers. *Research in Social Stratification and Mobility*, Vol. 30, No. 1, 113-128. Putnam, R. D. (1993). The Prosperous Community: Social Capital and Public Life. The American Prospect, Vol. 13, 35-42.

Rosenfeld, J., & Laird, J. (2016). Unions and Poverty. In D. Brady, & L. M. Burton, *The Oxford Handbook of the Social Science of Poverty* (pp. 800-819). Oxford: Oxford University Press.

Silver, H. (2015). *The Context of Social Inclusion*. New York: UN Department of Economic and Social Affairs.

Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Adit